

SAAT INI pemerintah sibuk menata anggarannya. Sampai-sampai presiden sendiri menurut pengakuannya harus meneliti APBN 2025 dengan cermat. Ternyata banyak dan besar sekali anggaran yang digunakan masing-masing kementerian dan lembaga serta daerah untuk hal-hal yang kurang urgen. Utamanya belanja rutin. Bahkan perjalanan dinas dan belanja kegiatan di hotel sangat besar.

Apakah kondisi demikian ini baru kali ini terjadi. Jawabannya sederhana, tidak. Bahkan sejak mulai jaman Orde Baru sudah diketahui dan disadari. Namun memang ada bedanya dulu dan sekarang. Terkait besarnya belanja rutin di lingkungan pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah.

Kalau jaman Orde Baru, ada kelonggaran dari pemerintah. Atau bahasa lugasnya sudah tahu sama tahu, karena belanja rutin itu bisa untuk dimainkan guna menutup anggaran yang tak terduga. Dan anggaran tak terduga jumlahnya sering bisa sangat besar. Biasanya

dinamakan dana taktis. Macam-macam gunanya dana taktis itu, yang jelas banyak kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara.

Selain itu, gaji PNS saat itu sangat kecil, bahkan amat kecil. Sampai-sampai jaman saya dulu masuk PNS tahun 1983, berkarier menjadi PNS itu bukan merupakan tujuan utama. Kalau bekerja di swasta yang top seperti Perbankan, Unilever, Pertamina, Pabrik Gula (ketika masih jaya), Perkebunan, Perhutani baru dikatakan keren dan kesejahteraan terjamin. Jadi PNS, oh sungguh gaji yang didapat hanya bisa untuk makan. Kalau beli rumah nyicil melalui perumahan subsidi RSS yang letaknya jauh di luar kota.

Oleh sebab itulah, jaman Orde Baru dana rutin itu untuk kegiatan taktis yang salah satu diantaranya untuk menambah kesejahteraan pegawai. Jadinya penyimpangan dana apalagi dana rutin seperti jamak. Dan sikap pengawas juga sangat permisif bila digunakan untuk taktis.

Sekali lagi karena gunanya juga untuk kepentingan kantor yang tidak bisa

Litera



Oleh: Suprawoto

Efisiensi Anggaran Pemerintah Sampai Kapan?

ditutup anggaran. Dan hampir tidak pernah terjadi yang namanya masuk penjara karena penyimpangan dan rutin di jaman Orde Baru. Paling kalau ketahuan untuk kepentingan pribadi diminta mengembalikan.

Zaman sekarang kondisinya sudah jauh berbeda sekali. Sekarang yang na-

manya ASN itu sudah cukup sejahtera menurut saya. Selain gaji pokok masih dapat tunjangan kinerja yang besarnya setiap departemen dan daerah berbeda-beda. Tergantung departemen atau lembaga itu penghasil apa tidak. Kalau sebagai lembaga penghasil tunjangan kinerjanya akan jauh lebih besar. Tidak hanya besar, besar sekali.

Demikian juga di pemerintahan daerah, juga demikian. Kalau daerah itu PAD-nya besar maka akan membawa konsekuensi tunjangan kinerjanya juga besar. Ambil contoh saja seperti tunjangan kinerja untuk ASN di Pemda DKI, Kota Surabaya dan lainnya, saya kira cukup besar.

Di kementerian saya dulu, ada dirjen penghasil PNB yang hasilnya dikumpulkan setiap tahun dirjen tersebut sangat besar. Kalau tidak salah termasuk empat besar penyumbang APBN. Tentu saja tunjangan kinerjanya ASN juga besar. Bahkan pernah terjadi seorang ASN dari dirjen tersebut dipromosikan di lingkungan kementerian juga, tidak mau

hanya nggondheli besarnya tunjangan kinerja yang besar tadi.

Oleh sebab itu yang namanya ASN saat ini jarang yang nyicil rumah tipe kecil seperti dulu. Pasti minimal cicilan rumahnya di perumahan kelas menengah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mencari-cari tambahan penghasilan yang tidak benar.

Namun sayang kenyataan tidak demikian. Walaupun tunjangan kinerjanya sudah cukup besar namanya manusia terus kurang. Akhirnya yaitu tadi, selain sudah dapat gaji, tunjangan kinerja juga masih mencari-cari lewat kegiatan yang benar-benar kurang tepat sasaran.

Kegiatan dilakukan di hotel dengan nilai perjalanan dinas yang besar. Dari kegiatan-kegiatan seperti itu, mendapat manfaat dari kegiatan, perjalanan dinas, honor narasumber dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya banyak yang hanya menggugurkan kewajiban.

Yang penting kegiatan jalan, dapat tambahan dari kegiatan tersebut ■

Baca Efisiensi... Hal 19

Efisiensi Anggaran Pemerintah Sampai Kapan?

Sambungan dari Hal. 16

Bayangkan kalau kegiatan yang dilakukan tersebut dilakukan semua departemen, lembaga, pemerintah daerah, maka isinya hotel dan gedung-gedung hanya kegiatan pemerintah. Belum kegiatan rutin yang lain seperti belanja ATK. Saya kadang berpikir, semua sudah serba komputer tapi kok masih beli ATK untuk apa saja. Kalaupun beli mestinya kian semakin kecil tidak semakin besar.

Tentu saja kebijakan seperti

ini ada yang dirugikan, yaitu pengusaha hotel dan travel serta yang terkait dengan bisnis itu. Saya jadi ingat waktu menteri saya Pak Sofyan A Djalil pernah bilang ke saya, kegiatan pemerintah itu (maaf) seperti "masturbasi." Hanya untuk kenikmatan dirinya sendiri bukan rakyat banyak yang mestinya menjadi perhatian program-program pemerintah.

Kita tunggu saja apakah nanti Pak Presiden tidak diprotes oleh para pengusaha hotel dan sejenis. Karena dulu kebijakan

yang sama membatasi perjalanan dinas dan kegiatan di hotel, kemudian banyak pengusaha yang protes akhirnya kebijakan itu dikendorkan lagi.

Juga efisiensi ini jangan hanya menasar anggaran di kementerian dan lembaga, tapi mestinya juga lembaga DPR dan DPRD yang nilai anggaran sejenis ini malah fantastis. Persoalannya pimpinan pada level pusat sampai daerah apa berani. (*)

***) Penulis merupakan mantan Bupati Magetan periode 2018-2023**